



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



dprkpkotajambi

pengaduan_pju

0853 8266 1819

Get the right information



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2024.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2024, DPRKP melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja dan sasaran strategis yang dilakukan pada tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 2024-2026, Rencana Kerja tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan semua jajaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Semoga dapat terwujudnya Kota Jambi yang lebih baik yang bermanfaat nyata untuk masyarakat Kota Jambi.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI


MAHRUZAR, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19780127 200501 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1-1

1.1. Struktur Organisasi..... 2

1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4

1.3. Isu - Isu Strategis..... 4

1.4. Kepegawaian 5

1.5. Keadaan Sarana Prasarana..... 9

1.6. Keuangan 11

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13-13

2.1 Perencanaan Strategis 13

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah 13

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah 15

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah 15

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah 16

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 16

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 19

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 21

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34-34

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 34

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini..... 35

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini DenganTahun Lalu 37

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi Perangkat Daerah 38

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Inin dengan Standar Nasional /Provinsi 39

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 39

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 40

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja 41

3.2 Realisasi Anggaran 2024 42

BAB IV PENUTUP 49-49

4.1 Kesimpulan 49

4.2 Rencana Tindak lanjut 50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman5

Tabel 1.2. Daftar Jenis Barang dan Kondisi Per 31 Desember 20249

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024-2026 16

Tabel 2.3. Sasaran, Program dan Kegiatan 17

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 20

Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2024..... 21

Tabel 2.6. Anggaran Belanja Per Sasaran Strategi..... 22

Tabel 2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 23

Tabel 3.1. Kategori Skala Peningkatan Capaian Kinerja 34

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024..... 35

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024..... 35

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 37

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 38

Tabel 3.6. Analisis Efisiensi..... 40

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 42

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2024..... 48



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan Landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis tahun 2024-2026 dan rencana kinerja tahun 2024 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.
2. Mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1.1 Struktur Organisasi

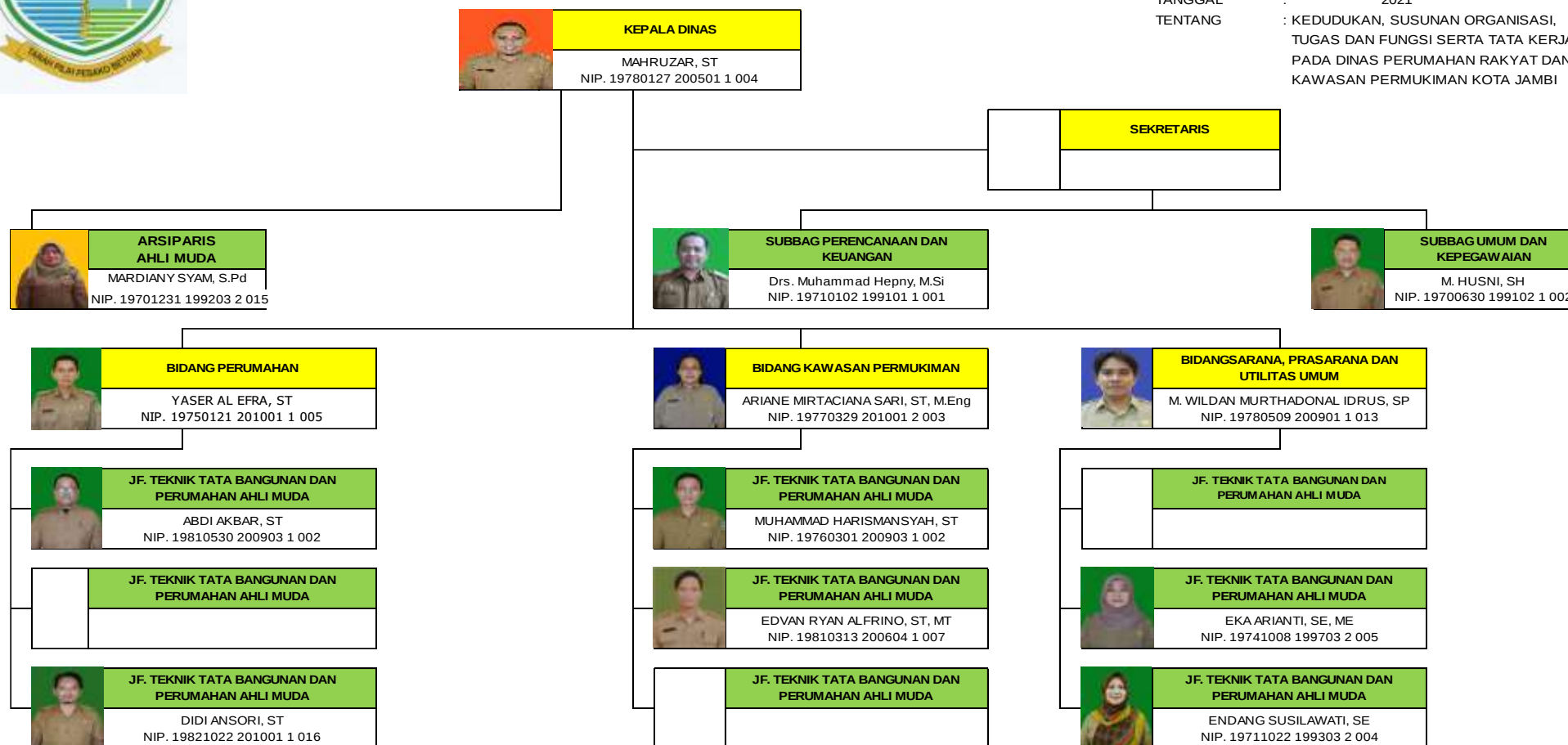
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR : 49 TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI





1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan Kota Jambi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- b. Penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu - Isu Strategis

Terdapat beberapa permasalahan utama yang berpengaruh berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kota Jambi yang meliputi antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik.
- b. Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya



- monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.
- c. Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi.
 - d. Permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan. Organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Jumlah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi memiliki sumber daya manusia pada tahun 2024 terdapat 112 orang yang terdiri dari 32 orang PNS, 17 Orang PPPK, 19 Orang Tenaga Kontrak, dan 43 orang Pekerja Harian Lepas (PHL). Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 76% (85 orang) dan sisanya sebanyak 24% merupakan pegawai perempuan (27 orang).

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	NAMA NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	MAHRUZAR, ST NIP. 19780127 200501 1 004	S.I. TEKNIK
2	M. WILDAN MURTADHO AL-IDRUS, SP, M.H NIP. 19780509 200901 1 013	S.2 HUKUM
3	ARIANE MIRTACIANA SARI, ST, M.Eng NIP. 19770329 201001 2 003	S.2 TEKNIK
4	YASER AL EFRA, ST NIP. 19750121 201001 1 005	S.I TEKNIK
5	Drs. MUHAMMAD HEPNY, M.Si	



	NIP. 19710102 199101 1 001	S.2 ADMINISTRASI PUBLIK
6	M. H U S N I, SH NIP. 19700630 199102 1 002	S.I HUKUM
7	EKA ARIANTI, SE, ME NIP. 19741008 199703 2 005	S.2 EKONOMI
8	SUPRIYANTA, SE NIP. 19660810 199102 1 001	S.I EKONOMI
9	ENDANG SUSILAWATI, SE NIP. 19711022 199303 2 004	S.I EKONOMI
10	EDVAN RYAN ALFRINO, ST, MT NIP. 19810313 200604 1 007	S.2 TEKNIK
11	MUHAMMAD HARISMANSYAH, ST NIP. 19760301 200903 1 002	S.I TEKNIK
12	ABDI AKBAR, ST Nip. 19810530 200903 1 002	S.I. TEKNIK
13	DIDI ANSORI, ST NIP. 19821022 201001 1 016	S.I TEKNIK
14	NUR INDAH SARI. H, ST NIP. 19840411 200903 2 009	S.I TEKNIK
15	ROY PARULIAN SIMANGUNSONG, SH NIP. 19800509 201001 1 007	S.I HUKUM
16	MARDIANY SYAM, S.Pd NIP. 19701231 199203 2 015	S.I PENDIDIKAN
17	MIFYA ERLIZA,ST NIP.19811001 201001 2 008	S.I TEKNIK
18	ZALDI YULIANSYAH, SE NIP. 19760702 200701 1 004	S.I EKONOMI
19	SULISTIAWATI, S.Kom NIP.19780724 201001 2006	S.I KOMPUTER
20	LEDYANA, SE NIP. 19810515 200903 2 008	S.I EKONOMI
21	MISRAH HARAHA, SE NIP. 19750327 200701 1 004	S.I EKONOMI
22	MUHAMMAD FADHLI FERNANDO, ST NIP. 19880415 201503 1 004	S.I TEKNIK
23	ANGLINA, ST NIP. 19750623 199703 2 004	S.I TEKNIK
24	HAVIF, S.IP NIP. 19790917 200012 1 004	S.I ILMU PEMERINTAHAN
25	DIAN EKA PUTRI, SE NIP. 19871002 201903 2 003	S.I EKONOMI



26	RENDRA YUSPIADINATA NIP. 19800504 200901 1 013	SLTA
27	DESY MARLINA NIP. 19811204 201001 2 005	SLTA
28	SUTJIPTO NIP. 19681208 201001 1 002	SLTA
29	RAHMAT GUNTUR NIP. 19820510 200801 1 006	SLTA
30	SYARIF NIP. 19700826 201001 1 003	SLTA
31	RUDIYANTO NIP. 19770719 200801 1 004	SLTA
32	INDRA TRIJAYA.HS NIP. 19740714 200901 1 008	SLTA
33	NANDA AIKA NIP. 19870717 200801 1 001	SMA
34	ABDUL MANAN, ST NIP. 19860402 202421 1 002	S.I TEKNIK SIPIL
35	APRISCA DWI HELENA, SE NIP. 19960428 202421 2 010	S.I EKONOMI
36	CHAIRUL YUDA, SH NIP.19931009 202421 1 011	S.1. HUKUM
37	DINIYAH LESTARI, SE NIP. 19960227 202421 2 007	S.1. EKONOMI
38	EGA DWI MEILANDA, SE NIP. 19960530 202421 2 020	S.1. EKONOMI
39	EKA VIDYA NUGRAHA, ST NIP. 19890411 202421 1 019	S.I TEKNIK ELEKTRO
40	ELANDA ELSYA PUTRA, ST NIP. 19970131 202421 1 002	S.I TEKNIK SIPIL
41	FRISKI AYU INDRIA, S.Pd NIP. 19900917 202421 2 001	S.1. PENDIDIKAN EKONOMI
42	JOHAN WARTHA, ST NIP. 19920103 202421 1 004	S.I TEKNIK SIPIL
43	MERY JANNATI, S.Kom NIP. 19910511 202421 2 016	S.I SISTEM INFORMASI
44	MUHAMMAD ARI AKBAR, SM NIP. 19961128 202421 1 002	S.1. MANAJEMEN
45	NOVITA AFRIANI, S.Kom NIP. 19890405 202421 2 025	S.I SISTEM INFORMASI
46	NOVY PUSPITA, ST	



	NIP. 19861123 202421 2 002	S.1 TEKNIK ARSITEKTUR
47	RISMA DWI NOVIANA, S.Kom NIP. 19941105 202421 2 010	S.I TEKNIK INFORMATIKA
48	SETIO MURDIYONO, SE NIP. 19921207 202421 1 009	S.1. EKONOMI
49	WAHYU MELDINO, ST NIP. 19911128 202421 1 011	S.I TEKNIK SIPIL
50	WILLDAN KURNIAWAN, S.Kom NIP. 19910403 202421 1 016	S.I SISTEM INFORMASI
51	MUJI HARNADI	SLTA
52	BENNY SEPRIANSYAH	SLTA
53	ANKA RIZKI	SMA
54	VEBRIANKA ANZANI, SE, M.Ak	S.II. AKUNTANSI
55	MUHAMMAD FADEL, Amd	D3 AKUNTANSI
56	IMELDA PUTRI NURHALIZA, S.Kom	S.I KOMPUTER
57	TRI YULIANTO, SE	S.I EKONOMI
58	AMAT SADLI, SE	S.I EKONOMI
59	LARASATI KARINA OKTAVIANI, SM	S.1 MANAJEMEN
60	RESKI RAMADHANI	SMK
61	MEGGIS GUSTRIADUM RETADA, SH	S.1. HUKUM
62	NURHAIDAH, SH	S.1. HUKUM
63	SUHENAN	SMP



64	HENDRA	SLTA
65	IRAMAYASARI	SD
66	FARIYANTI	SLTA
67	AAN HIDAYAT	SLTA
68	HERMAN SAWIRAN	SLTA
69	RIZKI FERDIANSYAH	SLTA
70	M. PARDIYANTO	SLTA

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada table berikut:

Tabel 1.2

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2024

NO	Nama Barang	Jumlah/ Luas
1	Mobil Kepala Dinas	1 unit
2	Mobil Operasional	1 unit
	Sekretariat	
	Roda 4	3 unit
	Roda 2	8 unit
3	Bidang Perumahan	
	Roda 4	2 unit
	Roda 2	2 unit
4	Bidang Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias dan Pemakaman	
	Roda 6	3 unit
	Roda 4	8 unit



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

	Roda 2	6 unit
5	Bidang Kawasan Pemukiman	
	Roda 4	1 unit
	Roda 2	3 unit
	Jumlah	
	Roda 6	3 unit
	Roda 4	16 unit
	Roda 2	19 unit
6	R. Kadis	48 M ²
7	R. Sekretariat	96 M ²
8	R. Ka. Bidang Tata Ruang	12 M ²
9	R. Loker	21 M ²
10	R. PJU	48 M ²
11	R. Bidang Perumahan	32 M ²
12	R. Bidang Pembinaan dan Pengawasan	12 M ²
13	R. WC	54 M ²
14	R. Arsip	48 M ²
15	R. Rapat	28 M ²
16	Dharma Wanita	120 M ²
17	Gudang	18 M ²
18	Mushollah	36 M ²
19	Peralatan Bongkar Reklame/ Mesin Las	1
20	AC	19
21	Kamera Pengawas (CCTV) Dan Perlengkapannya	0
22	Filling cabinet	6
23	Tangga Lipat	6
24	Almari Es	1
25	Kamera Digital	12
26	Komputer pc	6
27	Note book/ Laptop	26
28	Scanner	1
29	Sound System	4
30	Kursi	40
31	Meja	31
32	Proyektor	2
33	Printer	20
34	Televisi	1
35	Meubelair	1
36	Almari Arsip	14
37	Almari Keuangan	1
38	Lori	5



39	Bending Mechine	1
40	Brankas	1
41	Mesin Chainsaw	1
42	Mesin Potong Rumput	2
43	Tangga Geser	2
44	Tangga Teleskopic	1
45	Kursi Panjang Tamu	1
46	Pesawat Drone	2
47	Hardisk	4
48	PC	10
49	Tablet	5
50	Alat Ukur Laser	4
51	Alat GPS	2
52	Bending Mechine	1
53	Mesin Absen	2

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.42.190.859.000. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau



pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja dan efisisen.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecah masalah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi telah menyusun Rencana strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui pencapaian visi dan misi dari Walikota Jambi. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan sarana untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung perwujudan Misi Walikota Jambi yang ke-3.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026. Adapun visi yang tercantum dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**“KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN BARANG DAN JASA YANG
RELIGIUS DAN BERBUDAYA”**



Untuk mewujudkan Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.



11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2024 – 2026 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi mendukung misi:

“Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi”

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dari Tahun 2024-2026 adalah **“Mengembangkan infrastruktur**



transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi”.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan Pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN		
			2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	(Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR X 5%) + (Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani x 5%) + (Persentase Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum x 90%)	80,22%	81,87%	83,61%

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.3
Sasaran, program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya



		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP



		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	%	80,80

Indikator Sasaran Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni memiliki target sebesar 80,80% diperoleh dari Penjumlahan :

1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dikali bobot 10% dengan target 79,67% diperoleh dari Jumlah Backlog yang tertangani (32.934 unit) dibagi Jumlah Backlog yang harus ditangani (39.847 unit) dikali dengan 100%.

2. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani dikali bobot 15% dengan target 45,48% diperoleh dari Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (2.698 unit) dibagi dengan Total Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani (5.310 unit) dikali dengan 100%.

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dikali bobot 70% dengan target 93,59%. Perhitungan indikator ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari target jumlah lampu jalan yang tertangani (24.911 unit), sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak 25.000 unit. Jumlah target lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 70 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 95 lokasi pemakaman.

4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Registrasi Pengembangan Perumahan dikali bobot 5% dengan target 10,00% diperoleh dari Jumlah Pengembang Tersertifikasi (136 Pengembang) dibagi Jumlah Pengembang Aktif terdaftar di REI (151 Pengembang) dikali dengan 100%.



PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Huruf	BB
Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	%	79.67
Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	45.48
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	%	93.59
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Registrasi Pengembangan Perumahan	%	10.00

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Melaksanakan Kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.36.692.360.000,- Sedangkan anggaran perubahan menjadi Rp.42.190.859.000,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.39.337.050.822,- Dan belanja modal sebesar Rp.2.853.808.172,-.

Tabel 2.5

Target Belanja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	39.337.050.822	93,00%
Belanja Modal	2.853.808.172	7,00%
Jumlah	42.190.859.000	100%



2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.327.231.970	81,10%
		Program Pengembangan Perumahan	577.503.881	91,33%
		Program Kawasan Permukiman	2.459.644.798	99,07%
		Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	31.878.021.181	97,08%
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.457.170	40,50%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 5 (lima) program yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Berikut.

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target				Realisasi				Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	77,58%	77,58%	86,89%	89,24%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	6.327.231.970	5.131.544.991	81,10%
							<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	75	75	76	76	75	74,6	74,6	74,6	84.050.170	75.565.130	89,90%
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	3	0	0	4	3	0	0	61.452.350	56.397.050	91,77%
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	1	0	0	0	22.597.820	19.168.080	84,82%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	4.725.051.132	3.808.965.735	80,61%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	40	40	33	33	33	33	4.486.319.122	3.598.366.635	80,21%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	197.544.000	176.561.400	89,38%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	3	3	3	3	41.188.010	34.037.700	82,64%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	50%	97.437.500	67.750.000	69,53%
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	75	0	0	0	0	0	75	62.437.500	56.250.000	90,09%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	7	0	0	0	1	1	32	35.000.000	11.500.000	32,86%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	503.447.014	452.339.297	89,85%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	9.339.540	8.402.300	89,96%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	166.891.911	142.954.555	85,66%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	69.149.313	67.730.500	97,95%
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	2	1	0	1	2	2	17.599.050	8.659.000	49,20%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	10	10	5	5	5	5	10	240.467.200	224.592.942	93,40%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	371.247.554	368.380.000	99,23%
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	10	15	0	0	0	35	77.114.475	75.780.000	98,27%
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	10	6	0	0	0	21	294.133.079	292.600.000	99,48%
							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	143.500.000	84.557.529	58,93%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	1	1	1	1	2.500.000	2.500.000	100,00%
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	3	3	3	3	3	141.000.000	82.057.529	58,20%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25%	25%	25%	25%	10%	25%	25%	25%	402.498.600	273.987.300	68,07%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

2							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	8	5	9	5	3	6	291.204.800	224.261.500	77,01%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	25	32	0	23	1	21	111.293.800	49.725.800	44,68%
							Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	75,00%	75,00%	75,00%	79,67%	75,00%	75,00%	81,72%	82,65%	577.503.881	527.409.901	91,33%
							Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	100.000.000	99.456.000	99,46%
							Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0	0	0	1	0	0	0	1	100.000.000	99.456.000	99,46%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	147.642.640	119.844.255	81,17%
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	1	1	1	1	1	1	1	147.642.640	119.844.255	81,17%
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	25%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%	329.861.241	308.109.646	93,41%
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	1	0	0	1	0	0	62.135.941	59.565.610	95,86%

3



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	0	0	1	0	0	0	1	0	33.990.900	29.240.527	86,02%
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	25%	25%	25%	25%	0%	100%	100%	100%	404.590.960	399.788.500	98,81%
						Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	0	0	2	0	0	2	0	0	404.590.960	399.788.500	98,81%
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	43,95%	43,95%	45,48%	35,95%	43,95%	43,95%	45,48%	50,81%	2.021.062.938	2.007.847.731	98,91%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

4							Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	0	81	0	0	0	81	364	1.997.301.258	1.986.507.731	99,03%
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0	0	2	0	0	0	1	1	23.761.680	21.340.000	89,81%
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,27%	93,27%	93,59%	93,59%	93,27%	93,27%	99,64%	99,64%	31.878.021.181	31.861.306.976	99,95%
							Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,27%	93,27%	93,59%	93,59%	93,27%	93,27%	99,64%	99,64%	31.878.021.181	31.861.306.976	99,95%
							Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	0	0	1	0	0	0	0	1	111.065.042	106.513.600	95,90%
							Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	125	125	125	125	40	59	100	50	31.610.448.009	31.604.079.957	99,98%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

5						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2	2	3	3	3	3	6	10	136.136.354	131.254.519	96,41%
						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	0	0	1	0	0	0	1	20.371.776	19.458.900	95,52%
						Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	87,13%	8.457.170	3.425.500	40,50%
						Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	87,13%	8.457.170	3.425.500	40,50%



LKjIP DPRKP Kota Jambi Tahun 2024

							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang an Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	0	0	0	1	0	0	0	1	8.457.170	3.425.500	40,50%
																	42.190.859.000	39.960.564.126	94,71%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kedepan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00-89,9
3	Cukup	65,00-74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan anantara target indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$



3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	(Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR X 10%) + (Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani x 15%) + (Persentase Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum x 70%) + (Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan x 5%)	80.80%	89.24%	110.45%

Berdasarkan table diatas pada tahun 2024, indikator Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni memiliki relisasi sebesar 89,24% dengan capaian 110,45% Dari target sebesar 80,80% sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indicator ini termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan table 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam table 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	Jumlah Backlog Rumah Tertangani sampai dengan tahun 2024 : Jumlah Total	79.67%	82.65%	103.74%



		Backlog yang harus ditangani x 100%			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani : $\frac{\text{Total Target Rumah Tidak Layak Huni}}{100\%}$	45.48%	50.81%	111.72%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Perumahan yang di layani utilitas umum	(Persentase Lampu Jalan yang Tertangani x 95%) + (Persentase Makam Tertangani x 5%)	93.59%	98.36%	105.10%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	Jumlah Pengembang yang tersertifikasi : $\frac{\text{Total Target Pengembang Aktif terdaftar di REI}}{100\%}$	10.00%	90.07%	900.70%

Penjelasan dari target tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 79,67% memperoleh realisasi sebesar 82,65%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus $\frac{\text{Jumlah Backlog yang tertangani s.d Tahun 2024}}{\text{Jumlah Total Backlog Perumahan yang harus ditangani}} \times 100\%$. Jumlah Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 32.934 unit sedangkan Jumlah Backlog Perumahan yang harus ditangani sebanyak 39.847 unit. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR memiliki bobot sebanyak 10,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.
2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani dengan target 45,48% pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 50,81%, perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus $\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani sampai dengan tahun 2024}}{\text{Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani sampai dengan tahun 2024}} \times 100\%$. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.698 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 81 Unit sesuai Keputusan Walikota Jambi No.283 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja



Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani memiliki bobot sebanyak 15% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.

3. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 93,59% pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 98,36%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 24.911 unit, sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak 25.000 unit. Jumlah lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 70 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 95 lokasi pemakaman. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum memiliki bobot sebanyak 70,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.
4. Persentase Registrasi Pengembang Perumahan dikali bobot 5% dengan target 10,00% diperoleh dari Jumlah Pengembang Tersertifikasi (136 Pengembang) dibagi Jumlah Pengembang Aktif terdaftar di REI (151 Pengembang) dikali dengan 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR SASARAN	2023			2024			PERSENTASE REALISASI 2024 TERHADAP REALISASI 2023
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	79.60%	78.50%	101.40%	89.24%	80.80%	110.45%	99.83%



Berdasarkan table diatas, capaian realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 99,83%. Capaian kinerja tahun 2024 sedikit lebih rendah dari tahun 2023.

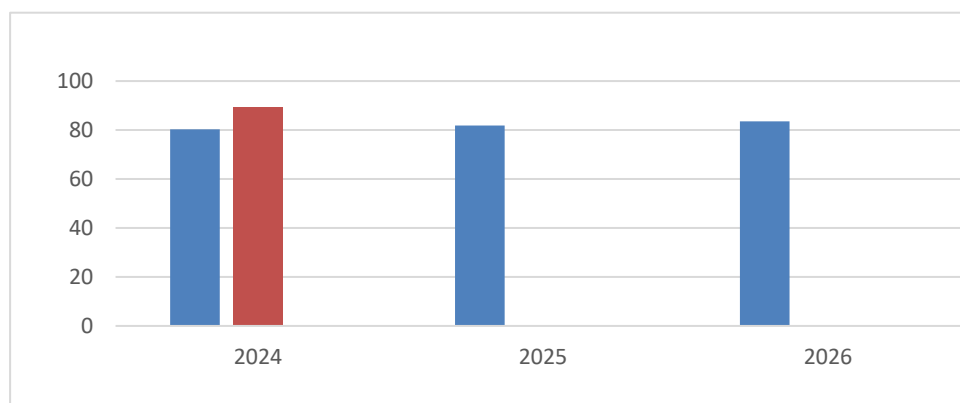
Hal ini dikarenakan di target rencana awal RENJA 2024 tercantum target jumlah bedah rumah layak huni sebanyak 100 unit, akan tetapi hanya terealisasi sebanyak 81 unit sesuai dengan Plafond Anggaran yang diperoleh dari TAPD Kota jambi.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026

INDIKATOR SASARAN	2024		2025		2026	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	80.22%	89.24%	81.87%	-	83.61%	-

Dari table diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2024 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

Realisasi tahun 2024 lebih tinggi terhadap target renstra di karenakan bedah rumah layak huni mendapat bantuan dari anggaran APBDN, APBD



dengan jumlah bedah rumah layak huni sebanyak 364 Unit di bandingkan target restra sebanyak 150 Unit.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL/PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	54 Unit (Dumisake/Provinsi) 229 Unit (Stimulan Perumahan Swadaya (APBN))	54 Unit 229 Unit	100% 100%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

FAKTOR PENGHAMBATAN ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI :

1. Terhambatnya revisi SK KUMUH no 166 tahun 2016
2. Sarana dan Prasarana yang belum cukup memadai, Anggaran dana yang kurang memadai, Banyak masyarakat tidak membuat surat pengajuan/proposal permohonan.

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- 1.a. Menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan diskusi antar OPD yang tugas dan fungsi nya saling beririsan dan tidak hanya beberapa kali melainkan harus dilakukan dengan intens agar dapat ditemukan solusi dari tugas dan fungsi yang saling beririsan tersebut.
- b. OPD yang tugas dan fungsi nya saling beririsan menginventaris perangkat peraturan di tingkat daerah yang relevan (perda maupun perwal) dan saling mendiskusikan penempatan tugas dan fungsi masing – masing dalam rumusan peraturan tersebut serta menginventaris lebih lanjut tentang kemungkinan kebutuhan revisi peraturan dimaksud.
- c. Melakukan konsultasi lebih lanjut kepada Ditjen Bangda Kemendagri jika ditemukan suatu permasalahan yang tidak ditemukan jalan keluarnya dan meminta rekomendasi kunjungan kerja ke daerah – daerah yang teridentifikasi oleh Ditjen Bangda sudah dapat menerapkan tugas dan fungsi sesuai arahan SPM dengan baik.



- d. Melakukan Melakukan kolaborasi dalam penanganan perumahan dan permukiman serta menyusun dan mengimplementasikan kebijakan agar tercapainya perumahan dan permukiman yang layak huni

PENJELASAN

1. Dengan telah tersusun nya Keputusan Walikota Jambi nomor 322 tahun 2024 gentang Lokasi perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Jambi dan Perwal n0 36 tahun 2024 tentang RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan). Maka dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat melakukan langkah-langkah strategis guna menangani dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman menjadi layak huni

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun 2024:

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak huni	110.45%	94.71%	15.74%



Berdasarkan table diatas, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 110,45% dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,71% dengan tingkat efisiensi sebesar (15,74%). Capaian kinerja diatas 100% akan tetapi penyerapan anggaran dibawah 100% karena efisiensi anggaran.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2024.

1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR dengan target 79,67% memperoleh realisasi sebesar 82,65%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Backlog yang tertangani s.d Tahun 2024 dibagi dengan Jumlah Total Backlog Perumahan yang harus ditangani dikali 100%. Jumlah Pembangunan Rumah Baru sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 32.934 unit sedangkan Jumlah Backlog Perumahan yang harus ditangani sebanyak 39.847 unit. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR memiliki bobot sebanyak 10,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.
2. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani dengan target 45,48% pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 50,81%, perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani sampai dengan tahun 2024 dibagi dengan Target Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus ditangani sampai dengan tahun 2024 dikali dengan 100%. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.698 unit dengan jumlah bedah rumah yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 81 Unit sesuai Keputusan Walikota Jambi No.283 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani memiliki bobot sebanyak 15% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum dengan target 93,59% pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 98,36%. Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus persentase lampu jalan yang tertangani dikali bobot 95,00% ditambah dengan persentase Lokasi Makam yang Tertangani dikali bobot 5,00%. Perhitungan tersebut diperoleh dari realisasi jumlah lampu jalan yang tertangani sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 24.911 unit, sedangkan target jumlah lampu jalan yang tertangani s.d akhir periode renstra adalah sebanyak



25.000 unit. Jumlah lokasi pemakaman yang tertangani sebanyak 70 lokasi pemakaman dari total jumlah lokasi pemakaman di kota Jambi sebanyak 95 lokasi pemakaman. Peningkatan perumahan yang di layani utilitas umum memiliki bobot sebanyak 70,00% terhadap Kinerja Sasaran Strategis Dinas. Pembobotan dilakukan berdasarkan urgency pada masing-masing indikator.

3.2 Realisasi Anggaran 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 94,71% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat Tabel dibawah ini

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Program/Kegiatan/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.327.231.970	5.131.544.991	81,10%
<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	84.050.170	75.565.130	89,90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.452.350	56.397.050	91,77%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.597.820	19.168.080	84,82%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.725.051.132	3.808.965.735	80,61%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.486.319.122	3.598.366.635	80,21%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.544.000	176.561.400	89,38%



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.188.010	34.037.700	82,64%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.437.500	67.750.000	69,53%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	62.437.500	56.250.000	90,09%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	11.500.000	32,86%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.447.014	452.339.297	89,85%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.339.540	8.402.300	89,96%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.891.911	142.954.555	85,66%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.149.313	67.730.500	97,95%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.599.050	8.659.000	49,20%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.467.200	224.592.942	93,40%



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.247.554	368.380.000	99,23%
Pengadaan Mebel	77.114.475	75.780.000	98,27%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.133.079	292.600.000	99,48%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.500.000	84.557.529	58,93%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.000.000	82.057.529	58,20%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.498.600	273.987.300	68,07%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.204.800	224.261.500	77,01%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.293.800	49.725.800	44,68%
Program Pengembangan Perumahan	577.503.881	527.409.901	91,33%



Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota	100.000.000	99.456.000	99,46%
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	100.000.000	99.456.000	99,46%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	147.642.640	119.844.255	81,17%
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	147.642.640	119.844.255	81,17%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	329.861.241	308.109.646	93,41%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	62.135.941	59.565.610	95,86%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	267.725.300	248.544.036	92,84%
Program Kawasan Permukiman	2.334.644.798	2.304.424.587	98,71%



Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	33.990.900	29.240.527	86,02%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	33.990.900	29.240.527	86,02%
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	404.590.960	399.788.500	98,81%
Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	404.590.960	399.788.500	98,81%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.021.062.938	2.007.847.731	99,35%
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.997.301.258	1.986.507.731	99,46%



Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	23.761.680	21.340.000	89,81%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	32.818.021.181	31.861.306.976	97,08%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	32.818.021.181	31.861.306.976	97,08%
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	111.065.042	106.513.600	95,90%
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	32.550.448.009	31.604.079.957	97,09%
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	136.136.354	131.254.519	96,41%
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	20.371.776	19.458.900	95,52%
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.457.170	3.425.500	40,50%



Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	8.457.170	3.425.500	40,50%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	8.457.170	3.425.500	40,50%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI	TARGET	CAPAIAN %
1.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	80.80	89,24	110.45	39.960.564.126	42.190.859.000	94.71

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja 103,74% dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 94,71%. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 89,24 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 42.190.859.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 39.960.564.126,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.230.294.874,-

Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi 2024 - 2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut



telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 80,22 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 39.960.564.126 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah 94,71 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kinerja Tahun 2025 :

1. Program SIPANJUL (Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan) merupakan aplikasi berbasis web yang mana dirancang untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi guna meningkatkan administrasi pada kantor DPRKP agar lebih efisien, lebih mudah, cepat, dan terarsipkan dengan rapi. Aplikasi ini terbuka untuk umum yang mana masyarakat bisa mengajukan lampu dan pelaporan jalan melalui website dan bisa di pantau apakah sudah dilakukannya perbaikan, diterima atau tidak proposal pengajuan lampu jalannya. Untuk staf administrasi perkantoran DPRKP Bidang PSU dapat melakukan pemetaan lokasi lampu jalan dan kwh



meter. Bisa juga di lakukannya penjadwalan melalui web, pengeluaran barang dan penghitungan stand meter / pemakaian kwh meter perbulannya.

2. Melakukan Efisiensi Anggaran.

Jambi, Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI



MAHRUZAR, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19780127 200501 1 004